



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021)3449230 PSW 5210, (021)3846322,
SITUS www.djpb.kemkeu.go.id

Nomor : S-180 /PB.1/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penawaran Program Beasiswa Doktorat dari
Islamic Development Bank (IDB)

19 Februari 2018

Yth. 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Bagian Lingkup Sekretariat DJPb
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Kementerian Keuangan nomor S-191/PP.2/2018 tanggal 12 Februari 2018 hal Penawaran Program Beasiswa Doktorat dari *Islamic Development Bank* (IDB), dengan ini disampaikan bahwa Kepala Pusdiklat PSDM menginformasikan penawaran program beasiswa dari IDB tahun 2018. Program yang ditawarkan berupa program doktorat pada berbagai bidang studi dan perguruan tinggi sebagaimana terlampir.

Terkait penawaran tersebut, dimohon bantuannya agar menginformasikan kepada seluruh pegawai DJPb pada lingkup unit kerja masing-masing. Dalam pengusulan calon peserta, diharapkan dapat memperhatikan komposisi SDM pada unit masing-masing baik dari sisi kualitas maupun kuantitas demi menjaga harmonisasi dan keselarasan antara pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari.

Usulan calon peserta dan berkas kelengkapan diterima Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 22 Februari 2018. Bersama ini dilampirkan ketentuan dan persyaratan untuk mengikuti seleksi beasiswa. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian SDM Sekretariat DJPb (Narahubung: Dhani, telepon 021-3846322).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Haryana

NIP 19600603 198502 1 001

Saya lihat paparan Pak Mardianto tidak sama. Apakah ini format baru atau tidak lengkap. Dan apakah masih berlaku format yang lama? Jika masih berlaku saya minta sesuai dengan tahun lalu saja. Karena susah dalam penyusunan laporan Dewan Pengawas jika data tidak lengkap.

Direktur Medik dan Keperawatan dr. Mardianto, Sp.PD,KEMD:

Data yang saya paparkan adalah data dibawah Direktorat Medik, hanya yang saya sampaikan sebahagian, karena akan terlalu panjang jika saya paparkan semuanya. Dan sebenarnya ada juga data Rumah Sakit yaitu dari Mutu. Saya juga punya detail-detail Indikator tersebut. Selain itu, ada indikator BLU. Kami setiap direksi memiliki indikator dan program yang di evaluasi setiap bulannya dengan Staf.

Anggota Dewas dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S. Sp.OK., Ph.D:

Saya harap detail-detail tersebut dimasukkan dalam laporan. Untuk bidang pelayanan, Saya sudah melakukan editing, termasuk pergantian indikator layanan dan target layanan.

Anggota Dewas Prof. dr. Harun Rasyid Lubis, Sp. PD-KGH :

Mengenai LOS, apa kita tidak mencoba untuk memberikan gambaran masing-masing unit. Misalnya gambaran pada ICU seperti apa, atau rawatan umum seperti apa. Dengan cara seperti itu akan terlihat ada anomali disana.

Dan untuk JCI, ini saya lihat ada perintah untuk mengakselerasikan Rumah Sakit Pendidikan USU menjadi Tipe B. Yang artinya membutuhkan SDM yang besar. Dan mereka menyedot SDM dari RSUP H. Adam Malik. Saya takut itu tidak termobilisasi oleh kita.

Ketua Dewas RSUP HAM dr. Siswanto, M.H.P., D.T.M:

Saya punya penelitian tentang *responsiveness*, termasuk RSUP H. Adam Malik. Pada tahun 2007, sebelum ada BPJS, semua dimensi responsi naik, kecuali waktu tunggu. Setelah 10 tahun berlalu, pada tahun 2017, setelah adanya BPJS, waktu tunggu semakin tinggi dan kecepatan pelayanan semakin menurun. Seharusnya, dibuat semacam sistem antrian, sehingga pasien tidak harus menunggu terlalu lama. Dibuat perjanjian, sehingga pasien datang hanya ketika dilayani.

A. Ketentuan Umum

- a. Calon peserta melengkapi seluruh berkas pendaftaran *softcopy* pada Aplikasi Training, serta menyampaikan *hardcopy* kepada Bagian Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal **22 Februari 2018**.
- b. Aplikasi pendaftaran yang dikirimkan oleh calon peserta secara mandiri kepada Pusdiklat PSDM Kementerian Keuangan tanpa melalui Bagian Sumber Daya Manusia Setditjen Perbendaharaan, tidak akan diproses lebih lanjut.
- c. Panitia tidak menerima berkas aplikasi dan berkas pendukung yang disampaikan melalui faksimile, surat elektronik, hasil faksimili yang difotokopi, ataupun file surat elektronik yang dicetak. Oleh karena itu, diharapkan para pelamar dapat menyediakan dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan sesuai dengan kriteria yang diminta.
- d. Pilihan bidang studi harus sesuai dengan Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM) DJPb, antara lain:
 1. *ICT for Development: Computer science, and Telecommunication;*
 2. *Islamic Economics, Finance and Banking;*
 3. *Development-related Social Sciences: International economics and Law.*

B. Persyaratan

1. Persyaratan Umum

- a. Berstatus PNS pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- b. Usia tidak lebih dari 42 tahun pada 28 Februari 2018.
- c. Pangkat dan golongan minimum adalah Penata Muda Tingkat I (III/b).
- d. Memiliki ijazah Magister (S2) yang diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- e. Untuk pendaftar yang gelar Magister (S2)-nya diperoleh dari Tugas Belajar, pada tanggal 23 Februari 2018 harus telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti program Tugas Belajar tersebut (dihitung sejak tanggal kelulusan/yudisium sebagaimana yang tercantum dalam ijazah).
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, ataupun tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku (dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Kantor unit masing-masing).
- g. Tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa pada program lain, tidak memiliki ijazah Doktorat (S3) ataupun tidak sedang mengikuti pendidikan Doktorat (S3) yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai (format terlampir).
- h. Direkomendasikan oleh atasan langsung, bahwa calon peserta berpotensi untuk dikembangkan sebagai karyasiswa program pascasarjana (minimal Pejabat Eselon III).
- i. Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah yang diperoleh setelah tanggal 28 Agustus 2017.
- j. Memiliki DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dibuktikan dengan salinan DP3 terakhir.
- k. Tidak sedang dalam proses kepindahan ke unit organisasi lain.
- l. Membuat surat pernyataan kesanggupan kembali bekerja pada DJPb serta bersedia melaksanakan ikatan dinas dan jika tidak memenuhinya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian.

13.	Pery Hardi 199202162013101002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal Bidang Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kepatuhan Internal	
14.	Peserta	-	BPS Provinsi Aceh	1 Orang
15.	Peserta	-	Perwakilan Bank Indonesia Aceh	1 Orang
16.	Peserta	-	Kanwil DJP Aceh	1 Orang
17.	Peserta	-	Bappeda Aceh	1 Orang
18.	Peserta	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	1 Orang
19.	Peserta	-	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2 Orang

PLH. KEPALA KANTOR WILAYAH,

 IWAN KURNIAWAN

- m. Bersedia memenuhi kewajiban untuk menyerahkan ijazah dan transkrip asli tugas belajar pada DJPb sampai dengan berakhirnya masa ikatan dinas.

2. Persyaratan Khusus dari pengelola beasiswa

- a. Telah diterima pada program doktoral (Ph.D) pada salah satu institusi yang memiliki reputasi yang baik di negara maju atau di negara anggota IDB. Pengelola beasiswa memberikan prioritas kepada pendaftar yang telah diterima pada institusi yang bekerja sama dengan IDB seperti, University of Cambridge, University of Birmingham, Queen Mary University of London, Imperial College London, University College London, Copenhagen University, Princeton University, KAUST and McGill University.
- b. Calon pendaftar dapat mengunjungi laman IDB pada alamat www.isdb.org untuk mengunduh formulir aplikasi dan membaca informasi secara lengkap mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran, serta fasilitas yang akan diterima apabila mendapatkan beasiswa tersebut.
- c. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh IDB dan perguruan tinggi yang dituju agar disampaikan dalam map terpisah dari dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 Persyaratan Umum.

C. Tata Cara Pendaftaran

1. Usulan calon peserta seleksi beasiswa dan lampirannya diajukan secara kolektif melalui unit eselon II masing-masing kepada Sekretaris DJPb c.q. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Usulan yang tidak melalui unit eselon II tidak akan diproses lebih lanjut.
2. Untuk calon peserta dari unit eselon III lingkup Sekretariat DJPb, harus diajukan secara kolektif melalui unit eselon III. Nota Dinas usulan ditetapkan oleh Kepala Bagian dan dikirimkan kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.
3. Perekaman data calon peserta secara *online* dilaksanakan sebelum mengirimkan berkas pendaftaran (*hardcopy*):
 - a. Perekaman data calon peserta dilakukan secara *online* melalui aplikasi *training* di alamat training.perbendaharaan.go.id mulai tanggal 19 s.d. 22 Februari 2018. Proses perekaman *online* dilakukan oleh:
 - 1) Subbag Kepegawaian pada masing-masing Kanwil, untuk lingkup Kanwil dan KPPN;
 - 2) Subbag Tata Usaha pada masing-masing Direktorat, untuk lingkup Direktorat di Kantor Pusat;
 - 3) Bagian Sumber Daya Manusia untuk lingkup Sekretariat DJPb.
 - b. Para penanggungjawab perekaman *online* tersebut (pengelola kepegawaian) wajib melaksanakan verifikasi secara teliti dan memadai atas seluruh berkas persyaratan calon peserta sebelum diusulkan.
 - c. Manual pendaftaran terdapat di alamat training.perbendaharaan.go.id.
 - d. Dalam proses perekaman *online* melalui aplikasi *training*, dilakukan juga pengunggahan hasil *scan* surat usulan peserta berikut dokumen pendukungnya.
 - e. Proses perekaman tidak menggugurkan kewajiban pengiriman *hardcopy* pendaftaran unit eselon II bersangkutan kepada Bagian Sumber Daya Manusia.
4. Pengiriman berkas pendaftaran (*hard copy*).
 - a. Para calon peserta mendaftarkan diri melalui unit eselon II masing-masing dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Formulir aplikasi beasiswa yang telah diisi dengan lengkap oleh calon pendaftar (Lampiran III).
 - 2) Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin (Lampiran IV).

Lampiran
 Surat Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh
 Nomor : KEP- /WPB.01/2018
 Tanggal : Februari 2018

**PESERTA FGD KAJIAN FISKAL REGIONAL TAHUNAN (ANNUAL REGIONAL FISCAL REPORT)
 TAHUN 2017 PROVINSI ACEH**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Zaid Burhan Ibrahim 197203011997031001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh	
2.	Iwan Kurniawan 196904161996031001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II	
3.	Fauzil Amri 196111021985091001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
4.	Henry Rulinson Purba 197009291997031001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I	
5.	Ahmad Fauzi 196511301985091001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh	
6.	Tommy H. Panjaitan 197205041999031001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II-C	
7.	Mangappu Pasaribu 197511111996021001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II-B	
8.	Muhammad Falih Ariyanto 198301012003121002	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I-D	
9.	Indrawan 198202182004121001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan	
10.	Arriza Adiya 199012202015021002	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II-B	
11.	Ishlahul Arham 199201292013101002	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II-C	
12.	Mahyiddin 196312311985031030	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pelaksana Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II-A	

- 3) Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan untuk memperoleh beasiswa dan tidak memiliki ijazah pascasarjana (S3)/ tidak mengikuti/tidak akan mengikuti program pascasarjana (S3) (Lampiran V).
 - 4) Surat Rekomendasi Atasan Langsung (Lampiran VI).
 - 5) Surat Pernyataan Kesiediaan Kembali Bekerja pada DJPb dan menyerahkan ijazah dan transkrip asli (Lampiran VII).
 - 6) Surat Keterangan tidak sedang dalam proses kepindahan ke unit organisasi lain baik di dalam atau di luar lingkungan Kementerian Keuangan (Lampiran VIII).
 - 7) Satu lembar fotokopi Ijazah S2 dan transkrip nilai yang dilegalisasi.
 - 8) Satu lembar fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisasi.
 - 9) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
 - 10) DP3 satu tahun terakhir.
 - 11) Dokumen-dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan oleh pengelola beasiswa dan perguruan tinggi agar disiapkan terpisah.
- b. Berkas pendaftaran tersebut dikirim secara kolektif melalui unit eselon II masing-masing kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana pengiriman tercepat ke alamat:

Bagian Sumber Daya Manusia
d/a Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Lantai 2,
Jl. Lapangan Banteng Timur I No. 2-4, Jakarta Pusat 10710

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal
Plt. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia,



Tjahjo Purnomo
NIP 19710209 199203 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA 'A' LANTAI II JALAN. TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH-23241
TELP.(0651) 31070 FAKS.(0651) 31094 SITUS: www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/aceh

SURAT TUGAS

Nomor : ST- /WPB.01/2018

Dalam rangka penyusunan KFR Tahunan Provinsi Aceh (Tahun 2017), dengan ini kami menugaskan para pejabat/pegawai sebagaimana terlampir untuk mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Kajian Fiskal Regional Tahunan Provinsi Aceh (Tahun 2017) pada hari Kamis, 22 Februari 2018 pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Aceh.

Demikian Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana tugas segera menyampaikan laporan kepada atasan langsungnya. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuannya demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Banda Aceh, 21 Februari 2018
Plh. Kepala Kantor,

— Iwan Kurniawan
NIP 19690416199603 1 001